

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang teori-teori dan definisi yang berhubungan dengan penelitian. Tujuannya agar dapat melihat realita yang terjadi apakah sesuai dengan dalil-dalil teori serta diperlukan uraian batasan konsep penelitian guna pembahasan lebih lanjut. Adapun teori atau definisi yang dijadikan acuan pada penelitian antara lain:

A. Kebijakan Publik

Sebagai suatu konsep, secara sederhana kita bisa menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau bentuk upaya-upaya lainnya. Bila melihat konsep dari kebijakan publik tersebut, kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana melihat atau mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik berupa serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan pemerintah atau mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda-beda.

Perbedaan deskripsi dari kebijakan publik ini dapat dilihat dari bagaimana para ahli mendefinisikan kebijakan publik itu sendiri, seperti halnya Richard Rose yang menyatakan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri, hingga Thomas R dye yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is whatever government choose to*

do or not to do” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).³²

Perbedaan deskripsi dari definisi atau deskripsi dari kebijakan publik menurut Rose maupun Dye diatas merupakan suatu bukti dimana setiap pakar atau ahli dalam menjelaskan kebijakan publik memiliki perbedaan. Definisi dari kebijakan publik yang dinyatakan oleh kedua ahli diatas bisa dikatakan sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan memiliki konsekuensi pada mereka yang terlibat, hanya saja dalam hal ini melihat bagaimana Rose maupun Dye mendefinisikan kebijakan publik masih bisa dikatakan cakupannya masih cukup luas. Dalam mendefinisikan kebijakan publik Rose tidak menegaskan bahwa pada kebijakan mengandung unsur tujuan didalamnya yakni seperti yang diketahui bahwa setiap kebijakan dilakukan agar tercapainya suatu tujuan tertentu, begitu pula dengan apa yang dinyatakan Dye yakni apa yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan suatu kebijakan publik yang pemaknaannya masih kurang jelas.

Ahli lain seperti halnya W.I. Jenkins berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan, beliau mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada

³² Ismail Nawawi, 2009. *Public Policy*. Surabaya: ITS Press Hal 8

prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.³³

Dalam pemaknaan menurut W.I. Jenkins tersebut bisa terlihat bahwa beliau melihat kebijakan publik sebagai suatu keputusan lalu memiliki tujuan dan cara dalam mencapai tujuan, tetapi bila melihat lebih dalam seyogyanya suatu kebijakan publik yang dilakukan aktor dalam hal ini pemerintah nantinya akan melaksanakan keputusannya secara nyata, dan karena bentuk dari kebijakan publik yang bisa dikatakan variatif, bisa saja keputusan atau sekedar ucapan yang dilakukan aktor ini bisa saja hanya menjadi sekedar konsep dengan cara-cara tersendiri tetapi akhirnya tidak dilaksanakan atau tidak ditindak lanjuti karena hambatan-hambatan tertentu.

Dari pemahaman yang dideskripsikan W.I. Jenkins diatas kita bisa menemukan bahwa suatu kebijakan publik selain mengandung unsur tujuan juga keputusan atau kebijakan yang diusulkan oleh aktor dalam hal ini memiliki ruang lingkup tertentu atau pada situasi tertentu, dan masalah tertentu. Hal ini bisa terlihat juga pada pendapat ahli lainnya yakni dari Steven A. Peterson yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan atau aksi pemerintah dalam mengatasi suatu masalah.³⁴

Memaknai apa yang dinyatakan beberapa pendapat ahli tersebut diatas, ditemukan bahwa dalam kebijakan publik terdapat unsur tujuan, dampak, ataupun aktor yakni pemerintah yang memiliki kewenangan, dan kebijakan publik ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan pada ruang lingkup tertentu. Bila

³³ Solichin Abdul Wahab, 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi aksara Hal 15

³⁴ Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo Hal 23

melihat dari setiap perbedaan penjelasan tentang kebijakan publik menurut para ahli diatas, walaupun berbeda tidak ada yang bisa dikatakan salah, hanya saja pada setiap pemaknaan akan kebijakan publik ini ada beberapa yang dikatakan masih luas sehingga perlu pengambilan konsep yang tepat.

Dalam Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti lebih cenderung menganut kebijakan publik yang dijelaskan Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.³⁵

Berangkat dari penjelasan dari beberapa ahli diatas kita bisa memahami bahwasannya kebijakan program pendidikan politik bisa dikatakan sebagai suatu arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mencapai tujuan tertentu dan mengatasi suatu permasalahan yang dilaksanakan pada ruang lingkup tertentu yang dimana didalamnya terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan. Jadi dalam hal ini pemerintah selaku yang memiliki kewenangan dituntut bisa memberikan kebijakan-kebijakan dengan tujuan yang pasti dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga nantinya memberikan dampak yang baik pada generasi muda. Dengan adanya program tersebut diharapkan mampu mendidik generasi muda agar memahami makna akan pentingnya pendidikan politik, serta dapat memberikan motivasi kepada generasi

³⁵ Leo agustino, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung Hal 7

agar mau terlibat langsung dalam organisasi politik dan juga berpartisipasi di dalam pemilu.

B. Implementasi Kebijakan

Menurut Parson secara garis besar model implementasi kebijakan dibagi menjadi empat yaitu:³⁶

1. Model Analisis Kegagalan.

Implementasi merupakan proses interaksi melalui penyusunan tujuan dengan tindakan, implementasi sebagai suatu proses politik adaptasi yang saling menguntungkan dan implementasi sebagai suatu permainan.

2. Model Rasional (*Top-Down*).

Model implementasi ini mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implemetasi dapat berjalan sukses. Terdapat beberapa ahli kebijakan yang mengemukakan antara lain Edward mengemukakan bahwa implementasi yang efektif dari keputusan pembuat kebijakan atau kebijakannya takkan bisa berjalan sukses. Sementara Van Meter dan Van Horn mempunyai pandangan bahwa implementasi perlu ada pertimbangan isi atau tipe kebijakan, Hood mengatakan implementasi merupakan langkah administrasi yang sempurna, Gun memandang implementasi memiliki beberapa syarat dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga menjadi sempurna, Grindle memiliki pandangan bahwa implementasi sebagian merupakan proses politik dan administrasi. Sedangkan, Sabatier dan Mazmanian mengatakan bahwa implementasi dapat dilihat melalui

³⁶ Putra, Fadilah. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik Dalam Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 58

kerangka analisisnya. Model *top-down* oleh Sabatier dan Mazmanian memiliki pusat hubungan antara keputusan melalui pencapaiannya, formulasi melalui cara mengimplementasikannya, dan potensi hierarki melalui batas-batasnya, serta keseriusan dalam mengimplementasikan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan. Model implementasi tersebut dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian tidak jauh berbeda dengan model implementasi *top-down* dari Van Meter dan Van Horn, Gun, Grindle dan Hood dalam memperhatikan segi kebijakan serta faktor lingkungan didalam kebijakan. Sementara faktor yang mempengaruhi Edward dalam implementasi kebijakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi. Akan tetapi pemikiran Sabatier dan Mazmanian lebih menganggap bahwa implementasi akan berjalan secara efektif bila birokrasi dapat mematuhi peraturan dan pedoman pelaksanaan teknis. Dengan begitu implementasi dapat dipahami yang diantaranya dikemukakan Sabatier dan Mazmanian memiliki fokus kepada kesesuaian dengan apa yang sudah ditetapkan atau sudah diatur sebelumnya dalam pelaksanaan program.

3. Model *Botton-Up*.

Model imlementasi *botton-up* ialah kritikan terhadap model *top-down* mengenai pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi didalam interaksi organisasi. Dapat diketahui implementasi memperhatikan memiliki bentuk interkasi antara pemerintah dengan warga negara. Implementasi dalam suatu model ini dipahami melalui beberapa definisi antara lain: implementasi adalah suatu proses yang tersusun dari konflik dan berunding. Implementasi memakai

multiple frameworks sehingga perlu adanya analisis melalui struktur institusional. Implementasi kebijakan merupakan proses alur. Model tersebut dikemukakan oleh Smith melihat bahwa implementasi kebijakan berawal dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana dalam kebijakan yang telah dibuat pemerintah mempunyai tujuan mengadakan perbaikan tidak lain menginginkan perubahan didalam kelompok sasaran masyarakat. Dengan adanya hal tersebut dipahami bahwa model implementasi yang dikemukakan Smith lebih menuju pada aspek perubahan sosial dan politik dari masyarakat yang menjadi fokus model tersebut.³⁷

4. Model Teori-Teori Hasil Sintesis (*Hybrid Theories*)

Model diatas merupakan definisi implementasi dikemukakan sebagai bentuk implementasi sebagai suatu evolusi. Implementasi sebagai pembelajaran. Implementasi sebagai *policy action continuum* serta implementasi sebagai sirkuler leadership implementasi sebagai hubungan inter-organisasi. Implementasi dan tipe-tipe, Implementasi sebagai hubungan antarorganisasi, implementasi sebagai teori ketidakpastian, implementasi sebageian berawal dari analisis kasus, implementasi sebagai suatu subsistem kebijakan dan implementasi sebagai manajemen dalam sektor publik.

“Analisis model implementasi kebijakan diatas hanya sebagai penunjang proses skripsi ini. Berdasarkan analisis dilapangan pelaksanaan pendidikan politik masih bersifat “*top down*”, dimana beliau menyatakan bahwa implementasi

³⁷ Putra. 2003. *Op. cit.* Hlm. 80

kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*³⁸. Setelah melihat beberapa model implementasi kebijakan tersebut peneliti mengambil model kebijakan dari Edward III yang bersifat *top down*". Ditegaskan juga bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan dari pembuat kebijakan atau kebijakannya takkan bisa berjalan sukses. Menurut Edward III Implementasi dalam kebijakan dipengaruhi adanya struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi. Secara spesifik Edward III lebih menekankan pada kinerja didalam kebijakan tersebut.³⁹

Selanjutnya, tahap implementasi dinyatakan merupakan tahapan yang sulit, tetapi tidak menutup kemungkinan kebijakan berjalan dengan baik. Suatu kebijakan mungkin bisa diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik maupun karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang baik sangat diperlukan untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan, baik dengan komitmen yang dimiliki badan pelaksananya maupun koordinasi yang baik dalam melaksanakan kebijakan Target kebijakan juga merupakan faktor yang bisa menentukan bagaimana suatu implementasi kebijakan bisa berhasil atau tidak, target kebijakan yang dimaksudkan ialah kelompok sasaran yang nantinya akan merasakan hasil dari kebijakan tersebut.

Dalam terlaksananya suatu kebijakan tentu pada tahap pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhinya. Merujuk pada

³⁸ Riant Nugroho. 2014. *Op.cit* Hal 673

³⁹ Sholichin Abdul, Wahab S. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 165

implementasi kebijakan menurut Edwards, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ialah komunikasi, *resources*, *disposition*, dan kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.⁴⁰

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari Edward ialah struktur birokrasi. Birokrasi seperti yang diketahui bersama merupakan suatu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan tertentu. Dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi mempunyai peranan yang penting, struktur organisasi yang panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.⁴¹

Dalam melihat betapa pentingnya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan, Edward menyatakan dua karakteristik utama dalam pengaruh struktur organisasi dalam implementasi kebijakan yakni pengaruh dari *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Salah satu aspek struktur birokrasi adalah adanya SOP, SOP merupakan prosedur-prosedur kerja dalam ukuran dasar, fungsi dari SOP sendiri ialah menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, sekali prosedur ditetapkan biasanya cenderung tetap berlaku. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru dalam melaksanakan kebijakan apalagi karena

⁴⁰ Ibid hlm 673

⁴¹ Ismail nawawi, *Op.cit* Hal 139

kecenderungan SOP yang bisanya setelah ditetapkan akan terus berlaku seperti yang telah dikatakan di atas.

Karakteristik selanjutnya dalam pengaruh struktur organisasi dalam implementasi kebijakan ialah fragmentasi organisasi. Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi, maksudnya ialah tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi. Para birokrat dengan alasan dan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Hal tersebut akan berpengaruh pada tidak berjalannya proses implementasi yang kurang maksimal

Selanjutnya faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan adalah sumberdaya, dalam implementasi kebijakan tentu saja harus didukung dengan adanya sumberdaya yang mendukung, seperti halnya sumber daya manusia, material, maupun sumberdaya-sumberdaya lainnya. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dijelaskann dengan baik, tanpa adanya sumberdaya yang mendukung implementasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien karena implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakannya.

Dalam rangka implementasi yang efektif, sikap dari implementor merupakan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti yang akan dibahas berikut ini yakni disposisi yang menurut Edward merupakan faktor yang berpengaruh dalam implementasi. Disposisi atau dalam hal ini bisa dikatakan kecenderungan-kecenderungan merupakan faktor ketiga yang memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Sikap

yang dimiliki implementor seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, sifat yang demokratis sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, karena implementor yang baik harus pula memiliki disposisi yang baik, sehingga nantinya bisa menjalankan kebijakan seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan akan menjadi sulit.

Interpretasi terhadap kebijakan merupakan hal yang patut diperhitungkan, sebab bila interpretasi yang terlalu bebas terhadap kebijakan akan semakin mempersulit implementasi yang efektif dan besar kemungkinan implementasi yang dijalankan menyimpang dari tujuan awal. Pentingnya kecenderungan-kecenderungan ini bagi implementasi kebijakan tentu akan menimbulkan dampak pada implementasi kebijakan pula. Seperti yang dinyatakan Edwards banyak kebijakan yang masuk pada “zona ketidakacuhan” dalam implementasi kebijakan karena pandangan yang berbeda dari pelaksana, ada beberapa kebijakan yang dilaksanakan tidak efektif karena bertentangan dengan pandangan-pandangan atau kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana.⁴²

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana suatu informasi tentang kebijakan tersebut diinformasikan kepada organisasi dan atau publik dan sikap atau tanggapan dari para pihak yang terlibat. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka dalam petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk

⁴² Budi winarno, 2008. *Op.cit* Hal 197

itu harus jelas. Jika kejelasan dari kebijakan tersebut tidak dipahami dengan baik petugas pelaksana atau implementor tentu akan mengalami kebingungan dan bisa menyebabkan mereka memaksakan kehendak mereka sendiri pada implementasi kebijakan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan yang seharusnya menjadi acuan dalam kebijakan tersebut. Informasi dari kebijakan juga tentunya akan menimbulkan dampak pada target kebijakan, jika kelompok sasaran tersebut tidak memahami kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, hal ini nantinya bisa menyebabkan resistensi dari kelompok sasaran.

Dalam menghindari penolakan dari kelompok sasaran yang bersangkutan diperlukan tiga hal seperti yang dinyatakan Edward dan dijelaskan kembali oleh namawi ismail (2009) dalam public policy sebagai berikut:⁴³

- 1) Penyaluran (*transmisi*) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula
- 2) Kejelasan, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan
- 3) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan, jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan yang bersangkutan

C. Partisipasi Politik

Miriam Budiarjo (1981) mengartikan Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak

⁴³ Ismail Nawawi, 2009. *Op. cit* hal 137

mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.⁴⁴

Menurut Keith Fauls (1999) memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.⁴⁵

Menurut Herbert McClosky (2010) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sementara Huntington dan Nelson (1997) partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.⁴⁶

⁴⁴ Miriam Budiarjo, 1981. *Partisipasi dan Partai Politik* (Sebuah Bunga Rampai). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Hlm. 150

⁴⁵ Faulks, Keith. 2010. *Sosiologi Politik*. Bandung: Nusa Media. Hlm. 226

⁴⁶ Huntington, S.P & Nelson J.M. 1997. *Partisipasi politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm. 78

D. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.⁴⁷

Pendidikan politik mensyaratkan mengandung unsur-unsur bernuansa moral. Semisal, ketaatan terhadap hukum atau aturan main, mengagungkan kepentingan publik, memproses kebijakan secara prosedural, pro rakyat banyak, penuh keteladanan, pencerahan publik, dan mengusung visi serta program yang populis. Pendidikan politik memiliki muatan politis, meliputi loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakat. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan: membentuk kepribadian politik, kesadaran politik dan partisipasi politik.

Sementara itu pendidikan politik memiliki fungsi sebagai pedoman kepada generasi muda Indonesia dalam meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan

⁴⁷ Kantaprawira Rusadi, 2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hlm. 55

generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan politik mengacu pada dasar hukum konstitusi yaitu pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian seluruh materi pendidikan politik harus mengacu pada amanat pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tidak terkecuali pada pelaksanaan bagi pendidikan politik generasi muda. Di Indonesia materi serta kurikulum bagi proses pendidikan politik generasi muda diatur dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik antara lain: a) Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara; b) kehidupan dan kerukunan hidup beragama; c) motivasi berprestasi; d) pengalaman kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia; e) pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik; f) disiplin pribadi, sosial dan nasional; g) kepercayaan pada pemerintah; h) kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan.⁴⁸

Praktek pendidikan politik sebenarnya sudah kita dapatkan sejak dini, hal ini dibuktikan dengan adanya agen-agen pendidikan politik. Selanjutnya agen tersebut memberikan sosialisasi melalui berbagai bermacam-macam lembaga. Beberapa diantaranya, seperti pelajaran kewarganegaraan disekolah-sekolah,

⁴⁸ Instruksi Presiden Nomor. 12 tahun 1982 tentang *Pendidikan Politik bagi Generasi Muda*

dengan sengaja dirancang demi tujuan sosialisasi politik, disamping juga untuk tujuan lain. Lainnya, seperti kelompok bergaul dan bekerja, hanya cenderung untuk mempengaruhi sosialisasi secara tidak langsung. Dan agen-agen tersebut diantaranya ialah: a) keluarga; b) sekolah; c) kelompok pergaulan; d) pekerjaan; e) media massa; f) kontak politik langsung.

Menurut Ramlan Surbakti (1999), pengertian pendidikan politik terlebih dahulu diawali mengenai sosialisasi politik. sementara: Sosialisasi politik terbagi menjadi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses tersebut anggota masyarakat dapat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.⁴⁹

Sementara Alfian berpendapat (1981), pendidikan politik dipahami sebagai upaya yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka dapat memahami, menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang terbangun.⁵⁰

Menurut Rusadi Kartaprawira (1988), mengartikan pendidikan politik sebagai "upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya." Maka pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berlanjut agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang secara terus-menerus

⁴⁹ Surbakti, Ramlan. (1999) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm 117

⁵⁰ Alfian. (1981). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Hlm 235

diperlukan pemahaman terkait masalah-masalah politik yang sangat kompleks, bersisi, dan cenderung berubah-ubah.⁵¹

Dengan demikian pendidikan politik adalah proses penanaman nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisasi, terencana, dan berlangsung kontinyu dari suatu satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak-watak bangsa (*nation character building*).

E. Generasi Muda

Generasi muda diharapkan memiliki kemampuan berfikir kritis, inovatif, dan kreatif dalam menghadapi tantangan dan persoalan bangsa. Generasi muda diartikan sebagai golongan manusia yang berusia usia 17 - 40 tahun, dengan semangat yang besar diharapkan mampu menjadi penerus perjuangan bangsa.⁵² Dalam sejarah bangsa Indonesia tidak lepas dari peran aktif pemuda dalam menyalurkan ide dan gagasan kritis dan inovatif serta menjadi ujung tombak perjuangan merubah kondisi bangsa ke arah yang lebih baik. Mereka dikategorikan sebagai agent of social change, yaitu pelopor perubah ke arah perbaikan suatu bangsa.

Menurut Kansil (2006) berpendapat generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan mempunyai kesadaran dalam pembangunan. Posisi generasi muda dalam masyarakat punya pengaruh besar terhadap perubahan masa mendatang. Generasi muda berfungsi sebagai penerus bangsa dan berpotensi mengisi serta membina kemerdekaan. Generasi muda pada umumnya dapat

⁵¹ Kantaprawira, Rusadi. (1988) *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hlm 54

⁵² GBHN, 1993, *Tentang Pendidikan*, Cetakan Kedua, Jogjakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. Hlm. 4

dipandang sebagai tahap dalam proses pembentukan kepribadian manusia mencari jati dirinya.⁵³

Sementara Hasibun (2008) berpendapat generasi muda adalah calon pengganti dari generasi terdahulu, dalam hal ini berumur antara 18-30 tahun, dan kadang-kadang sampai umur 40 tahun.⁵⁴ Generasi muda dalam masyarakat adalah sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga masa depan suatu bangsa ini terletak pada generasi mudanya, sebab mereka yang nantinya menggantikan tempat generasi sebelumnya dalam memimpin bangsa.⁵⁵ Generasi muda memiliki sikap atau karakter yang berbeda dengan generasi muda sebelumnya, dengan semua potensi yang dimiliki saat ini yang dapat dibilang dinamis terhadap segala isu yang terjadi, jiwa optimis yang tinggi namun belum memiliki pengendalian emosi yang belum stabil.

⁵³ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2006, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Cetakan Kedua, PT. Bumi Aksara. Hlm. 65

⁵⁴ Hasibuan, Malayu S. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm. 4

⁵⁵ Ibid Hlm. 14